BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengelolaan Dana Pendidikan

1. Pengertian Pengelolaan Dana Pendidikan

Dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa dana pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang berupa sumber daya (*input*) baik berupa barang maupun berupa uang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah. (Supriyadi, 2006: 3). Menurut Mulyasa (2005:47) " keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan". Menurut Harsono (2007 : 9), " Biaya pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan". Menurut sumbernya biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi 4 jenis yaitu: a) biaya pendidikan dari pemerintah, b) biaya pendidikan dari masyarakat orang tua/wali kelas, c) biaya pendidikan dari masyarakat bukan orang tua/wali siswa missal sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan, 4) lembaga pendidikan itu sendiri.

Pengelolaan dana pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan pendidikan karakter yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).

Nilai-nilai karakter dalam pengelolaan sekolah pada dasarnya adalah prinsip-prinsip manajemen yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip MBS dalam pengelolaan dana pendidikan hendaknya dilakukan secara mandiri, terbuka, kerjasama, dipertanggung-jawabkan dan partsipasif kepada masyarakat maupun pemerintah dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan. Sekolah yang telah melaksanakan MBS dengan baik, pada dasarnya sekolah tersebut telah berkarakter. (Aqib , Sujak, 2011: 31).

Mulyasa (2005:24) mengemukakan, bahwa : "Dalam MBS, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan sumber daya, baik kepada masyarakat maupun pemerintah".

Keterkaitan antara nilai - nilai karakter terhadap Tuhan YME (Religius), diri sendiri (jujur,bertanggungjawab, disiplin, kerja keras,percaya diri, mandiri) sesama (patuh, santun,sadar akan hak dan kewajiban, demokratis,

menghargai prestasi dan karya orang lain), lingkungan dan kebangsaan (peduli sosial, nasionalis, menghargai keragaman) sehingga membentuk karakter manusia yang unggul, maka penyelenggaraan pendidikan karakter memerlukan pengelolaan yang memadai, yaitu direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dievaluasi secara memadai.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan dana pendidikan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi alokasi pengeluaran secara mandiri, terbuka, kerjasama, akuntabilitas dan partisipasi yang dapat menentukan terselenggaranya proses pendidikan karakter dengan memanfaatkan sumber daya (*input*) yang ada baik berupa uang maupun bukan uang yang tertuang dalam RKS dan RKAS untuk tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

2. Tujuan Pengelolaan Dana Pendidikan
   a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pendidikan
   b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dana pendidikan
   c. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah (Manggar (et,al), 2011: 7)

B. Pendidikan Karakter

1. Pengertian Pendidikan Karakter

Pengertian karakter dalam Aqib, Sujak (2011:2), " karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain; tabiat; watak". Adapun menurut Takdiroatun (UNY, 2008) , karakter mengacu kepada serangkaian sikap (*attitudes),* perilaku *(behaviors),* motivasi *(motivation),* dan ketrampilan *(skills).* Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti "*to mark"* atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang yang berkarakter jelek. Sebaliknya orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia.

Pendapat lain dari pengertian karakter menurut Hermawan Kertajaya dalam Asmani , (2012:28) bahwa : "Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu". Ciri khas tersebut mengakar pada kepribadian manusia dan sebagai pendorong bagaimana seseorang bertindak, dan merespon sesuatu. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat.

Pengertian pendidikan karakter dijelaskan dalam Aqib, Sujak (2011: 3) adalah penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai. Menurut Yahya Khan dalam Asmani (2012: 30), "pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berfikir dan perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja sama sebagai keluarga, masyarakat, dan bangsa, serta membantu orang lain untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan". Lebih lanjut Suyanto mengatakan pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*).

Pendidikan karakter menurut Gaffar dalam Kesuma (*et,al*), (2011: 5) "sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh-kembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang tersebut". Menurut T. Ramli dalam Asmani (2012 : 32), pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah untuk membentuk pribadi warga Negara dan masyarakat yang baik, yang menganut nilai sosial budaya masyarakat dan bangsanya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu warga sekolah dalam memahami nilai-nilai karakter atau perilaku manusia yang berhubungan dengan tuhan Yang Maha Esa (religius), diri sendiri (jujur, bertanggungjawab, disiplin, kerja keras dan mandiri), sesama manusia (demokratis, menghargai karya dan prestasi orang lain), lingkungan (peduli sosial), dan kebangsaan(menghargai kergaman dan nasionalis) yang terwujud dalam pikiran, sikap, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma agama, hukum, tata karma, budaya dan adat istiadat.

2. Nilai – nilai Karakter

Asmani (2012: 36) menjelaskan bahwa terdapat lima nilai karakter utama, yaitu nilai- nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa (religius) , diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan, serta kebangsaan.

Berikut adalah diskripsi singkat nilai-nilai utama yang dimaksud.

a. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan
   Nilai ini bersifat religius. Dengan kata lain, pikiran, perkataan, dan tindakan seseoran diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan

b. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri
   1) Jujur
      Perilaku didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, pekerjaan,baik terhadap diri dan pihak lain.

2) Bertanggung jawab
   Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkugan,Negara dan Tuhan YME.
3) Bergaya hidup sehat
   Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan.
4) Disiplin
   Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5) Kerja keras
   Perilaku yang menunjukkan sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6) Percaya diri
   Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya.
7) Berjiwa wirausaha
   Sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya serta mengatur permodalan operasinya.
8) Berpikir logis, kritis, dan inovatif
   Berpikir dan melakukan sesuatu berdasarkan kenyataan atau logika untuk menghasilkan cara atau hasil yang mutakhir dari apa yang telah dimiliki.
9) Mandiri
   Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
10) Ingin tahu
    Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar .
11) Cinta ilmu
    Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan.

c. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama
   1) Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain
      Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri serta orang lain.
   2) Patuh pada aturan-aturan sosial
      Sikapmenurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan keentingan umum.
   3) Menghargai karya da prestasi orang lain
      Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain.
   4) Santun
      Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya ke semua orang.
   5) Demokratis
      Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

d. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan
   Peduli sosial dan lingkungan
   Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin member bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

e. Nilai kebangsaan
   1) Nasionalis
      Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya.
   2) Menghargai keberagaman
      Sikap memberikan respek/hormat terhadap berbagai macam hal, baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, maupun agama. (Asmani, 2012:36)

3. Pendidikan Karakter Terpadu dalam Manajemen Sekolah

Pembinaan nilai-nilai katakter dapat dilaksanakan melalui berbagai komponen dalam manajemen sekolah, yaitu kurikulum dan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, siswa, sarana dan prasarana, dan pembiayaan pendidikan. Sekolah diharapkan mampu melakukan perencanaan, melaksanakan kegiatan, dan evaluasi terhadap tiap-tiap komponen pendidikan yang di dalamnya memuat nilai-nilai karakter. Sekolah dapat mengisi pendidikan karakter yang terpadu dengan sistem pengelolaan sekolah artinya, sekolah mampu merencanakan pendidikan (program dan kegiatan) yang menanamkan nilai-nilai karakter, melaksanakan program dan kegitan yang berkarakter, dan juga melakukan pengendalian mutu sekolah secara berkarakter.

a. Nilai-nilai Karakter dalam Pengelolaan Sekolah

Nilai-nilai karakter yang ada dalam pengelolaan sekolah pada dasarnya adalah prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang baik, yaitu mandiri, terbuka, bertanggung jawab, kerjasama/kemitraan, dan partisipatif.

Berkaitan dengan nilai-nilai tersebut di atas penulis akan mengambil tiga nilai karakter dalam penelitian berhubungan dengan judul penelitian " Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan

Dana Pendidikan Berbasis Karakter",yaitu Nilai *partisipasi,transparansi* atau keterbukaan*, akuntabilitas* atau bertanggung jawab.

1) *Partisipatif,* merupakan penerapan nilai karakter terhadap sesama yaitu nilai demokratis. Makna partisipasi diantaranya adalah, dalam penyusunan RKS dan RKAS, pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan, *stakeholders* terlibat aktif, tercipta kondisi yang terbuka dan demokratis, yaitu semua warga sekolah didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyusunan sampai evaluasi program dan kegiatan sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Partisipatif
2) *Transparansi (Terbuka),* merupakan penerapan nilai karakter diri sendiri yaitu nilai kejujuran. Setiap orang yang terkait dengan penyusunan RKS dan RKAS, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan sekolah dapat mengetahui proses dan hasil akhirnya secara keseluruhan;
3) *Akuntabel,* merupakan penerapan nilai karakter diri sendiri yaitu bertanggung jawab .Sekolah berkewajiban mempertanggung-jawabkan proses dan hasil penyusunan RKS dan RKAS, pelaksanaan, evaluasi, dan hasil-hasil program sekolah kepada pihak-pihak terkait atau publik yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (Pedoman Pendidikan Karakter SMP)

b. Pendidikan Karakter dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen sumber daya keuangan yang efektif dan efisien memberikan kontribusi yang optimum. Kepala Sekolah sebagai orang yang bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan sekolah harus memahami fungsi manajemen keuangan. Hasil study Heyman dan Loxley dalam Danumihardja (2004: 6) , pada 29 negara yang dikutip oleh Bank Dunia dalam *Basic Education Study* (1989) menyatakan bahwa faktor

guru , waktu belajar, manajemen sekolah, sarana fisik dan biaya pendidikan memberikan kontribusi yang berarti terhadap prestasi siswa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan dana untuk menjalankan program sekolah menjadi salah satu faktor penting untuk memenuhi kualitas dan prestasi belajar. Kemampuan Kepala Sekolah menjadi jaminan apakah sekolah itu efektif atau tidak, sebab Kepala Sekolah menjadi motor penggerak utama pelaksanaan program sekolah.

MBS sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

Pengambilan keputusan partisipatif merupakan pengambilan keputusan yang terbuka dan demokratik, di mana warga sekolah terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan sekolah.

Pendidikan karakter dapat memberikan kontribusi dalam Pengelolaan biaya pendidikan di sekolah. Kepala Sekolah hendaknya memperhatikan bahwa biaya pendidikan juga digunakan untuk mengkondisikan pendidikan karakter.Pengalokasian biaya untuk program

dan kegiatan pendidikan karakter ini dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah.

1) Rencana Kerja Sekolah (RKS)

Di dalam Permen Diknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan dijelaskan bahwa, setiap sekolah/madrasah harus memiliki RKS (Rencana Kerja Sekolah) dan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). RKS dan RKAS dijadikan dasar pengelolaan sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabel.

a) Pengertian RKS

Rencana Kerja Sekolah/Madrasah merupakan rencana kerja yang memiliki jangka waktu empat tahun yang disusun dan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah/Madrasah, Guru, Pegawai, beserta Komite Sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. (Suhaili, Zulkarnaen, 2011: 5)

Rencana Kerja Sekolah/Madrasah harus sesuai, sejalan, dan mendukung tercapaianya Visi, Misi dan Tujuan Sekolah yang telah disusun sebelumnya.

Program Tahunan Kepala Sekolah kadang disebut Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun oleh Kepala Sekolah bersama

Dewan Guru/Pegawai dan Komite Sekolah. Program-program pada Program Tahunan ini harus sama dengan program-program yang terdapat di dalam RKS. Program Tahunan merupakan realisasi atau pelaksanaan dari RKS. RKS merupakan program jangka menengah sedangkan Program Tahunan atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan program jangka pendek.

b) Tujuan RKS

Menurut Pedoman Penyusunan RKS Tujuan penyusunan RKS meliputi : a) menjamin agar tujuan sekolah / madrasah yang telah dirumuskan secara maksimal; b) mendukung koordinasi antar *stakeholder* sekolah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat; e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkesinambungan.

2) Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) menjadi salah satu bagian dari Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang cukup penting dan strategis dalam pengembangan sekolah pada umumnya. RKAS menjadi salah satu indikator utama pengembangan sekolah dimasa

yang akan datang. Besar kecilnya RKAS sangat ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah dalam mengelola sekolah dan menggali dana sekolah dari pemerintah.

Sebelum penyusunan RKAS perlu juga dimusyawarahkan oleh Kepala Sekolah bersama-sama dengan Dewan guru, Pegawai, dan Komite Sekolah kemudian dibuat Surat Keputusannya sehingga RKAS yang akan dan telah disusun dapat terlaksana dengan tertib, lancar dan sukses mencapai tujuan.

c. Integrasi Nilai Karakter dalam Perencanaan Program dan Kegiatan

1) Nilai Partisipasi dalam Perencanaan RKS dan RKAS

Partisipatif merupakan salah satu penerapan nilai karakter dalam hubunganya dengan sesama yaitu nilai demokratis, dimana dalam perencanaan RKS maupun RKAS melibatkan semua warga sekolah yang menunjukkan adanya persamaan hak dan kewajiban antara dirinya dengan orang lain. Menurut Sagala (2011: 162), Partisipasif adalah cara pengambilan keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik, yaitu warga sekolah didorong untuk terlibat aktif secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi terhadap mutu dan pencapaian tujuan sekolah.

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011: 61), Partispasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud dari partsipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan maupun penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Menurut pendapat Aqib& Sujak (2011: 36), Partisipasi merupakan kondisi terciptanya lingkungan yang terbuka dan demokratis, di mana warga sekolah (guru,siswa, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, usahawan, dan sebagainya) didorong untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan dalam bentuk RKS dan RKAS, pelaksanaan dan evaluasi RKS dan RKS, yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

2) Nilai Transparansi dalam Perencanaan RKS dan RKAS

Trasparansi berarti apa adanya sangat identik dengan kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu implementasi dari penanaman nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri. Jujur merupakan

perilaku yang menjadikan dirinya sebagai orang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

Menurut Undang-undang nomor 09 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dijelaskan bahwa transparansi yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan.

Sekolah adalah organisasi pelayanan publik dalam bidang pendidikan yang diberi amanah oleh masyarakat untuk mengelola dana dan mendidik putra- putrinya sehingga wajib adanya keterbukaan atau transparansi terhadap RKS dan RKAS. Transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan publik terhadap sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa, sebagaimana disampaikan oleh Aqib dan Sujak;

> "Transparansi terhadap RKS dan RKAS sangat diperlukan untuk membangun keyakinan dan kepercayaan publik terhadap sekolah. Dalam hal ini transparansi juga merupakan keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan penyusunan RKS dan RKAS dapat mengetahui proses dan hasil akhir dari RKS dan RKAS tersebut. Dengan kata lain, transparansi sama dengan polos, apa adanya, tidak bohong, tidak curang, jujur, dan terbuka terhadap publik tentang RKS dan RKAS". (Aqib & Sujak, 2011 : 37)

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam penyusunan RKAS dimaksudkan adanya keterbukaan dalam menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu dan bisa diakses oleh siapa saja mulai dari proses hingga hasil akhir sehingga masyarakat dapat mengawasi atau mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sekolah.

3) Nilai Akuntabilitas dalam Perencanaan RKS dan RKAS

Bertanggung jawab merupakan salah satu contoh nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri. Bertanggungjawab merupakan sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap diri sendiri, masyarakat, Negara dan Tuhan Yang maha Esa.

Sekolah diberi amanah oleh publik untuk menyelenggarakan pendidikan sebaik-baiknya sehingga penyelenggara sekolah berkewajiban mempertanggungjawabkan proses dan hasil kerjanya kepada publik, termasuk dalam hal RKS dan RKAS, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Aqib dan Sujak bahwa:

> "Akuntabilitas sekolah adalah pertanggungjawaban sekolah kepada warga sekolah, masyarakat dan pemerintah melalui pelaporan dan pertemuan yang dilakukan secara terbuka terhadap RKS dan RKAS yang telah disusun. Semua warga sekolah , masyarakat dan pemerintah memiliki hak untuk mengetahui RKS dan RKAS , baik selama proses penyusunan maupun hasil akhir yang disusun di dalam RKS maupun RKAS". (Aqib, Sujak, 2012:37)

d. Integrasi Nilai-nilai Karakter dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Minimal ada tiga prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman nilai-nilai karakter, yaitu prinsip *efektifitas, efisiensi, dan produktivitas*. Pelaksanaan program dikatakan *efektif* apabila hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan. *Efisiensi* lebih menekankan pelaksanaan program dan kegiatan maksimal dengan biaya minimal. Adapun prinsip *produktivitas* adalah apabila pelaksanaan program dan kegiatan tersebut hasilnya secara kuantitatif dan kualitatif minimal sesuai dengan tujuan. (Aqib, Sujak, 2012: 38)

1) Nilai Partisipasi dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Partsipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati. Partisipasi adalah proses dimana *stakeholders* terlibat aktif dalam pelaksanaan program kegiatan dan anggaran sekolah. Partisipasi juga merupakan kondisi terciptanya lingkungan yang terbuka dan demokratis, dimana warga sekolah dan masyaraka terlibat langsung dalam pelaksanaan program kegiatan dan anggaran sekolah. Partisipasipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kegiatan dan anggaran merupakan perwujudan nilai karakter diri sendiri yaitu nilai demokratis. Ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan program meliputi: *pertama*, menggerakkan sumber daya

dan dana; *kedua*, kegiatan administrasi dan koordinasi; *ketiga,* penjabaran program. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan satu unsur penentu dalam keberhasilan program. (Dwiningrum, 2011:62)

Partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam RKS dan RKAS di sekolah merupakan suatu keharusan. Tujuan utama peningkatan partisipasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam RKS dan RKAS ini adalah untuk : a) meningkatkan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam RKS dan RKAS, b) memberdayakan kemampuan *stakeholders* dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam RKS dan RKAS, c) meningkatkan peran dan fungsi *stakeholders* untuk mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam RKS dan RKAS, d) menjamin agar setiap keputusan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam RKS dan RKAS mencerminkan aspirasi *stakeholders.*(Aqib,Sujak, 2011: 44)

2) Nilai Transparansi dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Menurut Harsono (2007: 90), Pengelolaan dana yang transparan terjadi manakala aspek-aspek administrasi dari pengelolaan dana dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait dengan keuangan sekolah.

Transparan bukan berarti semua aspek adminitrasi bisa dilihat oleh siapa saja., hanya pihak-pihak yang terkait dengan keuangan sekolah yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang keuangan, dan bendahara sekolah. Kalau berhubungan dengan proyek yang bersumber dari masyarakat , maka pihak yang terkait adalah ketua komite sekolah dan bendahara komite sekolah.

Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung-jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Lembaga pendidikan yang telah melakukan pengelolaan manajemen keuangan secara transparan berarti telah menerapkan nilai karakter diri sendiri yaitu nilai kejujuran sehingga memunculkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sekolah semakin meningkat.

Transparansi merupakan keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam RKS dan RKAS dapat mengetahui proses dan hasil akhir dari RKS dan RKAS.

Pengembangan transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan publik terkadap sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa. Menurut Aqib dan Sujak menjelaskan, "Upaya untuk peningkatan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam RKS dan RKAS antara lain :a) men-dayagunakan berbagai jalur komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung; b) menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi dan prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada publik khususnya selama pelaksanaan program; c) melakukan kerjasama berbagai pihak (media cetak, elektronik, dan lainnya) untuk mengkomunikasikan dan mempublikasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam RKS dan RKAS yang telah ditetapkan.

3) Nilai Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban merupakan salah satu contoh penerapan nilai karakter diri sendiri. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban penyelenggaraan organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas sekolah dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam RKS dan RKAS dan hasil-hasilnya adalah pertanggung jawaban sekolah kepada warga sekolahnya, masyarakat, dan pemerintah melalui pelaporan dan pertemuan yang dilakukan secara terbuka terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam RKS dan RKAS berikut dengan semua hasilnya. Semua warga sekolah, masyarakat dan pemerintah memiliki hak untuk mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam RKS dan RKAS dan semua hasilnya". (Aqib& Sujak, 2011 : 44)

e. Integrasi Nilai-nilai Karakter dalam Pengawasan dan Evaluasi Program dan Kegiatan

1) Nilai Partisipasi dalam Pengawasan dan Evaluasi Program dan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan program yang ditetapkan atau terjadi penyimpangan. Partisipasi dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sekolah dari warga sekolah sangat diperlukan, baik partisipasi dalam hal evaluasi diri, evaluasi dalam pengembangan KTSP, evaluasi dalam pendayagunaan dalam pendidik dan tenaga kependidikan maupun akreditasi sekolah. Secara umum

bentuk partisipasi warga sekolah dapat berupa pemikiran, tenaga, biaya dan materi lainnya untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi, bentuk partisipasi tersebut merupakan perwujudan dari penerapan nilai karakter terhadap sesama yaitu demokratis.

Partisipasi diperlukan dalam evaluasi dan pengawasan dengan tujuan antara lain: a) menumbuhkan rasa kepemilikan, kebersamaan, dan tanggungjawab sesuai dengan kemampuannya; b) menghasilkan perang-kat evaluasi yang lengkap dan valid ; c) menghasilkan data-data evaluasi yang lengkap dan valid. (Aqib, Sujak, 2011 : 48)

2) Nilai Transparansi dalam Pengawasan dan Evaluasi Program dan Kegiatan

Keterbukaan dalam evaluasi meliputi keterbukaan dalam perencanaan, dan hasil-hasil evaluasi/akreditasi sekolah. Evaluasi sekolah (evaluasi diri, evaluasi dan pengembangan KTSP, evaluasi pendayagunaan pendidik dan kependidikan, dan hasil akreditasi sekolah) baik pelaksanaan maupun hasil-hasilnya ditunjukkan secara terbuka dengan tujuan antara lain: (1) membangun kepercayaan publik kepada sekolah; (2) meningkatkan citra sekolah; (3) mendayagunakan dan mengoptimalkan jalur komunikasi dari semua sumber daya sekolah; (4) memperoleh timbal balik demi perbaikan atau penyempurnaan

pelaksanaan evaluasi sekolah". (Aqib, Sujak, 2011 : 49). Jika sekolah telah melaksanakan Keterbukaan dalam evaluasi meliputi keterbukaan dalam perencanaan, dan hasil-hasil evaluasi/akreditasi sekolah berarti sekolah telah berhasil menanamkan nilai kejujuran dalam pengawasan dan evaluasi yang merupakan salah satu contoh nilai karakter diri sendiri dan tujuan tersebut diatas telah tercapai.

3) Nilai Akuntabilitas dalam Pengawasan dan Evaluasi Program dan Kegiatan

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban sekolah kepada warga sekolahnya, masyarakat dan pemerintah melalui pelaporan dan pertemuan yang dilakukan secara terbuka terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi/pengawasan terhadap RKS dan RKAS berikut dengan semua hasilnya. Akuntabilitas merupakan wujud dari nilai karakter diri sendiri yaitu bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan hasil evaluasi.

Komite sekolah tidak hanya sekedar mencari dana tetapi hendaklah dilibatkan secara langsung dalam pengawasan terhadap pengelolaan sekolah khususnya pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari

orang tua wali, sehingga masyarakat semakin arif dan paham bahwa untuk menghasilkan output yang baik dibutuhkan dana yang cukup.

Tujuan utama akuntabilitas pengawasan dan evaluasi sekolah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah khususnya dalam hal pengawasan dan evaluasi sekolah sabagai salah satu syarat terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya.

C. Peneliti Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Constant Okello-Obura and I.M.N. Kigongon-Bukenya EASLIS, (1999) Makerere University, Kampala, Uganda. *"Financial management and budgeting strategies for LIS programmes "* dalam makalah ini membahas tentang strategi penganggaran yang berlaku untuk lembaga LIS. Beberapa sistem penganggaran yang ditawarkan lembaga LIS meliputi: strategi program penganggaran, strategi penganggaran berbasis kinerja (PB), strategi penganggaran tanggung jawab pusat (RCB) ,dan strategi penganggaran berbasis nol (ZBB) . Strategi ZBB berarti bahwa setiap unit dimulai lagi dari nol dan harus memberikan pembenaran untuk setiap permintaan. Manfaat dari Strategi ZBB adalah dapat menunjukkan biaya-biaya yang tidak lagi diperlukan, sehingga memungkinkan lembaga LIS menggeser uang ke tempat yang di butuhkan di masa depan.

Dalam pengelolaan dana pendidikan perlu adanya keterlibatan orang tua untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah, sebagaimana disampaikan Peter Kiplangat Koross, Moses Waithanji Ngware, Anthony Kiplangat Sang, (2009) tentang "*Principals' and students' perceptions on parental contribution to financial management in secondary schools in Kenya*".

> *The results indicated that parental involvement had positive influence on financial management outcomes. Practical implications-Parental participation can have positive impacts on the processes of teaching and learning with active and frequent contacts between parents and school administration improving school's financial accountability and transparency. Participation will strengthen the partnership between parent teacher associations, community and school administration in addition to democratizing school governance. Based on the findings of the study, parental involvement in the area of financial management is still low in the district. It was also noted that parental involvement greatly influenced the way finances in schools were managed. From these observations, parental levels of involvement in the area of school finances affect financial transparency in schools.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua memiliki pengaruh positif dalam pengelolaan keuangan. Implikasi praktis - partisipasi orang tua dapat memiliki dampak positif pada proses belajar mengajar dengan kontak aktif antara orang tua dan sekolah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah. Partisipasi akan memperkuat kemitraan antara orangtua, guru dan sekolah serta untuk mendemokratisasi sekolah. Berdasarkan temuan penelitian, keterlibatan orang tua dalam bidang pengelolaan keuangan

masih rendah di kabupaten. Mereka juga mencatat bahwa keterlibatan orang tua sangat mempengaruhi cara pengeloaan keuangan di sekolah-sekolah. Dari pengamatan ini, tingkat keterlibatan orang tua dalam bidang keuangan sekolah mempengaruhi transparansi keuangan di sekolah.

Timothy J. Gronberg, Dennis W. Jansen, dan Lori L. Taylor, (2011) " *the Impact of facilities on The Cost of Education". " We find that the cost of education increases as the capital stock increases, suggesting either that school districts are grossly overcapitalized or that nicer facilities refl ect an important, unmeasured dimension of school quality.* Mereka mengemukakan tentang hubungan antara fasilitas sekolah dengan biaya pendidikan, ditemukan bahwa biaya pendidikan meningkat dengan meningkatnya modal saham, hal itu menunjukkan bahwa sekolah yang kelebihan modal atau fasilitas yang lebih baik merefleksikan kualitas sekolah dan dimensi-dimensi lain yang tak bisa terukur.

Susan Winton,(2008) tentang "*The appeal(s) of character education in threatening times: caring and critical democratic responses"* Artikel ini membahas kebangkitan popularitas pendidikan karakter di Amerika Serikat dan Kanada. Kebijakan pendidikan karakter di kedua negara menggunakan strategi yang sama untuk menarik beragam publik. Kebijakan menanggapi keinginan untuk prediktabilitas dan stabilitas dengan mengklaim bahwa pendidikan karakter tradisional mempersiapkan para siswa sebagai tenaga kerja,

meningkatkan prestasi akademik, mendorong kewarganegaraan aktif, menciptakan sekolah yang lebih aman, dan mengajarkan siswa nilai-nilai universal. Artikel ini diakhiri dengan mengajukan komitmen untuk merawat hubungan dan pentingnya pendidikan demokratis secara sosial sebagai alternatif pendidikan karakter tradisional.

Penelitian yang dilakukan oleh Charles B. Shrader (2004) yang berjudul *"Cheating and Moral Judgment in the College Classroom: A Natural Experiment* menyatakan bahwa perilaku yang menipu yang dilakukan seseorang berhubungan dengan sedikitnya rasa kejujuran yang dimiliki oleh orang tersebut, selain itu sikap menipu seseorang terjadi karena sikap pertimbangan moralitas yang rendah.